

# KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT berkat rahmat Nya Laporan Kinerja Inspektorat Badan Standardisasi Nasional (BSN) Tahun 2015 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini dalam rangka mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas sesuai Visi dan Misi yang harus dipenuhi oleh Inspektorat – BSN dalam kurun waktu tahun 2015

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat ini memuat laporan kinerja kegiatan tahun 2015, sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat-BSN serta Rencana Strategis Inspektorat-BSN Tahun 2015-2019. Lebih lanjut juga disampaikan pencapaian kinerja dan kegagalan dalam melaksanakan kegiatan di tahun 2015.

Diharapkan Laporan Kinerja Inspektorat tahun 2015 ini, yang merupakan laporan pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang dapat dicapai pada tahun 2015, dapat menjadi referensi atau sebagai bahan masukan dalam perencanaan dan pemicu untuk peningkatan kinerja kedepan, khususnya bagi Inspektorat-BSN.

*Semoga Allah SWT selalu membimbing dan mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.*

Jakarta, 15 Januari 2016  
Inspektur

Nasrudin Irawan

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Disusunnya Laporan Kinerja Inspektorat BSN Tahun 2015 ini pada dasarnya merupakan kewajiban dan upaya untuk mengemukakan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan dan dicapai selama tahun 2015. Ikhtisar Laporan Tahunan Inspektorat merupakan cerminan akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi BSN termasuk akuntabilitas keuangan negara.

Pada tahun 2015 ini Inspektorat BSN telah melaksanakan kegiatan pengawasan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2015 yang telah ditetapkan hasil pelaksanaan dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

**Tabel 1. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengawasan Inspektorat Tahun 2015**

No.	Kegiatan dan Komponen	Jumlah Anggaran			Output Kegiatan/Komponen		
		Pagu Anggaran	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
3551	Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.071.874.000,-	1.052.634.415,-	98,21	1 laporan	1 laporan	100
011	Audit Operasional	164.287.000,-	161.917.500,-	98,56	4 LHA PNBPN dan Kinerja Keuangan Semester I, BMN, Triwulan III dan Audit PBJ	4 LHA PNBPN dan Kinerja Keuangan Semester I, BMN, Triwulan III dan Audit PBJ	100
012	Pengendalian Intern	45.429.000,-	43.897.500,-	96,63	- Tindak Lanjut Penyelesaian RTP - 11 Laporan Analisis resiko unit kerja	- Tindak Lanjut Penyelesaian RTP Semester I - 11 Laporan Analisis resiko unit kerja tahun berikut	100

013	Reviu Laporan Keuangan	26.760.000,-	23.495.000,-	87,80	3 LHR	3 LHR	100
014	Reviu/Evaluasi LAKIP	48.807.000,-	46.196.000,-	94,65	2 LHE	2 LHE	98,77
015	Monitoring Pedoman Pengawasan	19.854.000,-	19.725.500,-	99,35	1 laporan	1 laporan	100
016	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	17.040.000,-	16.925.000,-	99,33	2 laporan	2 laporan	100
017	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK-RI	38.141.000,-	37.919.000,-	99,42	3 program	3 program	95
018	Pengawasan Lainnya (PL)	543.134.000,-	537.893.915,-	99,04	9 Laporan	9 Laporan	100
019	Kegiatan Pemantauan	135.131.000	134.319.000,-	99,40	1 Laporan	1 Laporan	100
020	Penanganan Pengaduan Masyarakat	33.291.000,-	30.346.000,-	91,15	6 Aduan	6 Aduan	100

Keterangan:

011 : TLHA BMN dan Kinerja Keuangan sebagian masih dalam proses

013 : LHR adalah Laporan Hasil Reviu

014 : LHE adalah Laporan Hasil Evaluasi

017 :Bila dilihat dari jumlah tindaklanjut realisasi 95 % karena ada temuan yang belum bisa di selesaikan : Penghapusan BMN, Inventarisasi asset dan SOP PNBPN masih dalam proses pengesahan

## **Kegiatan 3551. Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal**

### **Komponen 011. Audit**

Pada tahun 2015, Inspektorat telah melakukan 4 (empat) kegiatan audit PNBPN dan Kinerja Keuangan Semester I dan Triwulan III terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) masing-masing Deputi dan Sestama. Berdasarkan hasil monitoring Tindak Lanjut

Hasil Audit (TLHA) yang dilakukan oleh Inspektorat, disimpulkan adanya peningkatan kinerja audit yaitu dengan adanya peningkatan atas respon dari semua auditan (PPK) terhadap rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA). Hal ini ditunjukkan dengan telah ditindaklanjuti seluruh rekomendasi Inspektorat atas temuan hasil audit oleh auditan (100%).

### **Komponen 012. Pengendalian Internal**

Sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan tindak lanjut pelaksanaan SPIP. Pada tahun 2015, Inspektorat melakukan Monitoring Penyelesaian Rencana Tindak Pengendalian Semester I dilakukan tahun 2015 dan Semester II dilakukan tahun 2016 dan 11 Laporan Analisis Resiko Unit Kerja.

### **Komponen 013. Reviu Laporan Keuangan**

Reviu atas Laporan Keuangan sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang telah dilakukan Inspektorat selama tahun 2015 antara lain:

- 1) Reviu Laporan Keuangan TA 2014 *Unaudited*, yaitu reviu laporan keuangan yang dilakukan sebelum pemeriksaan oleh BPK-RI,
- 2) Reviu Laporan Keuangan TA 2014 *Audited*, yaitu reviu laporan keuangan yang dilakukan setelah pemeriksaan oleh BPK-RI,
- 3) Reviu Laporan Keuangan TA 2015 Semester I, yaitu reviu terhadap laporan keuangan pada semester I tahun berjalan.

### **Komponen 014. Evaluasi LAKIP**

Sesuai Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014, maka dilakukan evaluasi terhadap LAKIP BSN dan LAKIP Eselon I oleh Inspektorat BSN. Dalam evaluasi tersebut, Inspektorat menyampaikan 7 (tujuh) rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Tim Penyusun LAKIP antara lain:

- 1) Renstra Eselon I perlu segera dibuat,
- 2) Rencana Kerja Tahunan (RKT) Eselon I perlu diperbaiki,
- 3) Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon I perlu segera ditetapkan,
- 4) Penetapan Kinerja (PK) Eselon I perlu segera ditetapkan,
- 5) LAKIP Unit Kerja Eselon I Tahun 2015 perlu segera dibuat,

- 6) Perlu ditetapkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang handal dan dilakukan secara berkala,
- 7) Perlu adanya pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya, evaluasi program, dan evaluasi akuntabilitas kinerja atas unit kerja yang selanjutnya disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk ditindaklanjuti sebagai perbaikan perencanaan, perbaikan penerapan manajemen kinerja, perbaikan kinerja, dan untuk mengukur keberhasilan unit kerja.

#### **Komponen 016. Program Kerja Pengawasan Tahunan**

Sebagai pemandu dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan di Inspektorat, maka perlu disusunnya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang memuat rencana kegiatan yang akan dilakukan, pagu anggaran yang dibutuhkan, output kegiatan yang dihasilkan, jumlah hari pengawasan (HP) bagi JFA dalam pengumpulan Angka Kredit dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Pada tahun 2015 dilakukan pembahasan 2 (dua) program kerja yaitu penyempurnaan atas PKPT Tahun 2015 dan Usulan PKPT Tahun 2016 dengan memperhatikan perubahan kebijakan dalam pengelolaan keuangan BSN di tahun 2015 dan upaya peningkatan untuk nilai Angka Kredit JFA.

#### **Komponen 017. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI**

Pada tahun 2015 BPK-RI melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan BSN tahun 2014 dan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan 12 rekomendasi terhadap 5 temuan. Atas rekomendasi tersebut telah dilakukan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK-RI oleh Inspektorat dengan realisasi tindak lanjut sebesar 94 % dari total rekomendasi.

#### **Komponen 018. Pengawasan Lainnya**

Pada tahun 2015, Inspektorat BSN melakukan kegiatan pengawasan lainnya:

##### **1) Kepesertaan dalam kegiatan Seminar/Lokakarya dan pertemuan pengawasan**

Dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan wawasan para personel Inspektorat, selain melalui Diklat, Inspektorat selalu mengirimkan personelnnya pada berbagai kegiatan. Kegiatan itu baik yang diselenggarakan di lingkungan BSN maupun di luar BSN seperti kegiatan yang diselenggarakan oleh BPKP, BPK-RI, KPK, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN dan RB serta

Ombudsman RI. Kegiatan itu antara lain berupa Forum Kemitraan dan Forum Lokakarya APIP.

## **2. Sosialisasi 4 Perka di Auditorium BPPT**

Dalam rangka melaksanakan salah satu agenda prioritas BSN yaitu pelaksanaan reformasi birokrasi, Badan Standardisasi Nasional (BSN) menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Kepala BSN (Perka BSN) dan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SE Menteri PAN RB) pada Jumat, 12 Juni 2015 di Ruang Auditorium Gedung BPPT II, Jakarta. Perka BSN yang dimaksud adalah :

- Perka BSN No. 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BSN,
- Perka BSN No.5 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran,
- Perka BSN No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan BSN, serta
- Perka BSN No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dan
- SE Menteri PAN RB No. 1 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

Kegiatan ini mengundang oleh seluruh pegawai BSN, yang menghadirkan pembicara :

- Sekretaris Utama BSN Puji Winarni,
- Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi BSN Kukuh S.A.,
- Kepala Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi BSN Konny Sagala,
- Kepala Pusat Pendidikan dan Pemasarakatan Standardisasi BSN Metrawinda Tunus, serta
- Auditor Madya Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bagus Sunjoyo.

## **3. Koordinasi dalam Forum Pengawasan Eksternal**

Kegiatan dalam forum pengawasan selalu dilakukan di lingkungan Kementerian Ristek yang terhimpun dalam Forum Inspektorat LPNK Ristek (FILI). Pertemuan dalam Forum ini membahas hal-hal yang aktual sedang berlangsung dan diperbincangkan, terutama berkaitan dengan masalah pengawasan. Beberapa pertemuan diselenggarakan, secara bergiliran antar anggota forum.

Keanggotaan Forum Inspektorat LPNK Ristek Dikti :

1. Kemenristek
2. BPPT
3. LIPI
4. BATAN
5. LAPAN
6. BIG
7. BSN
8. Bapeten

Pada tahun 2015 BSN menjadi tuan rumah pada bulan Nopember dan kegiatan berupa FGD dilaksanakan tanggal 10 November 2015 di JCC bertepatan dengan acara Bulan Mutu BSN. Peserta FGD adalah seluruh Kepala Inspektorat dan 2 auditor tiap Inspektorat anggota FILI serta 2 (dua) orang perwakilan setiap unit kerja di BSN.

#### **4. Pelaksanaan Seminar Anti Korupsi**

Tanggal 9 Desember merupakan hari anti korupsi dunia. Momentum ini merupakan waktu yang tepat bagi BSN untuk menyelenggarakan Peringatan Hari Anti Korupsi dengan mengundang seluruh pegawai dan mengundang Dharmawanita Istri Eselon I dan Eselon II. Dengan peringatan ini diharapkan pegawai dan keluarga lebih cepat memahami dan menyadari serta mempunyai cara pandang yang sama mengenai arti pentingnya pencegahan korupsi di kaitkan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Maksud diundangnya Dharmawanita adalah agar dalam keluarga mempunyai persepsi yang sama dalam pemahaman arti pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Kegiatan ini dilaksanakan di ruang Auditorium Gedung II BPPT pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 Jam 08.00-13.00. Seminar ini mengundang seluruh Pegawai BSN sejumlah lebih dari 370 Orang dan Dharmawanita yang terdiri dari Istri Pejabat Eselon I, Eselon II serta pengurus Dharmawanita Eselon III dan Eselon IV.

##### **Materi Seminar**

1. Sekretaris Menteri Ristek Periode 2010 – 2013 Mulyanto terkait revolusi mental, Mulyanto menyampaikan yang dimaksud dengan revolusi mental menurut Presiden RI I Soekarno yakni suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang berhati putih,

berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, dan berjiwa api yang menyala-nyala.

2. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf. PPATK sebagai badan intelijen keuangan yakni menerima informasi, menganalisis dan mendesiminasikan. Disamping itu, PPATK dapat menelusur aliran transaksi seseorang atau korporasi. “Tindakan korupsi mayoritas terlacak dalam bentuk tunai/cash,” ungkap Yusuf. “
3. “Pengawasan terhadap kinerja Aparatur melalui LAPOR” disampaikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan, Penyusunan dan Evaluasi Program Pelayanan Publik, Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB) R. Dwiyoga Prabowo Soediarto. Menurut R. Dwiyoga Prabowo Soediarto, LAPOR adalah sarana pengaduan online yang dibangun tim UKP4 (sekarang berubah menjadi KSP) yang pada awalnya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja aparatur, namun dalam perjalanannya juga menangani berbagai macam pengaduan masyarakat.

## **Kegiatan 019 Kegiatan Pemantauan**

### **Rapat Kerja Inspektorat**

Dalam rangka meningkatkan fungsinya sebagai Aparat Pengendalian Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat melaksanakan kegiatan rapat kerja yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal 30-31 Oktober 2015. Kegiatan rapat kerja ini dilaksanakan untuk mengevaluasi pekerjaan yang sudah terlaksana, membuat langkah-langkah strategis akhir tahun dan merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan ditahun depan.

### **Kegiatan Pengawasan non PKPT**

Selain kegiatan yang telah direncanakan pada PKPT Tahun 2015, Inspektorat juga melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendampingan pemeriksaan Tim Auditor BPK-RI atas Laporan Keuangan BSN TA 2014 pada bulan Januari – April 2015.
2. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) sesuai PMK Nomor 94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelahaan RKA-K/L



dengan fasilitasi dan pembiayaan dari Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha pada Bulan Juli 2015.

3. Pengembangan profesi JFA dengan mengadakan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) yang membahas isu-isu pengawasan terbaru di kalangan JFA.
4. Pada tahun 2015 Inspektorat BSN telah mengeluarkan Peraturan Kepala BSN :
  - Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional;
  - Peraturan Kepala BSN Nomor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional;
  - Peraturan Kepala BSN Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.
  - Peraturan Kepala BSN Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	.....	ii
DAFTAR ISI	.....	x
BAB I PENDAHULUAN	.....	1
1.1 KEDUDUKAN	.....	1
1.2 TUGAS	.....	1
1.3 FUNGSI	.....	1
1.4 STRUKTUR ORGANISASI	.....	1
1.5 LINGKUNGAN STRATEGIS	.....	2
1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN	.....	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	.....	
2.1 UMUM	.....	7
2.2 VISI DAN MISI	.....	8
2.2.1 Visi	.....	8
2.2.2 Misi	.....	9
2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	.....	
2.3.1 Tujuan	.....	10
2.3.2 Sasaran Strategis	.....	10
2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA	.....	11
2.5 KEBIJAKAN DAN PROGRAM	.....	13
2.6 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015	.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	.....	19
3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015	.....	19
3.2 ANALISIS CAPAIAN SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMAN (IKU) DAN NON IKU TAHUN 2015	.....	22
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN	.....	46

3.3.1	Realisai Keuangan	.....	46
3.3.2	Perbandingan Realisasi Keuangan	.....	48
BAB IV	PENUTUP	.....	49
4.1	KESIMPULAN	.....	49
4.2	SARAN	.....	49
LAMPIRAN			
Lampiran - 1	INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT - BSN	.....	L-1.1
Lampiran - 2	RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019	.....	L-2.1
Lampiran - 3	RENCANA KINERJA TAHUN 2015 – 2019	.....	L-3.1
Lampiran - 4.1	PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT TAHUN 2015	.....	L-4.1
Lampiran - 4.2	PENGUKURAN KINERJA INSPEKTORAT TAHUN 2015	.....	L-4.2

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 KEDUDUKAN**

Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor: 130/KEP/BSN/7/2006 Tanggal 4 Juli 2006 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor : 965/BSN-I/HK.35/05/2001 Tanggal 25 Mei 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, pada BAB VII A Pasal 142 A ayat (1) menyatakan bahwa Inspektorat merupakan unsur pengawasan di lingkungan BSN, dan ayat (2) menyebutkan Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional.

## **1.2 TUGAS**

Sebagaimana keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional di atas pada Pasal 142 B menyebutkan, Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BSN

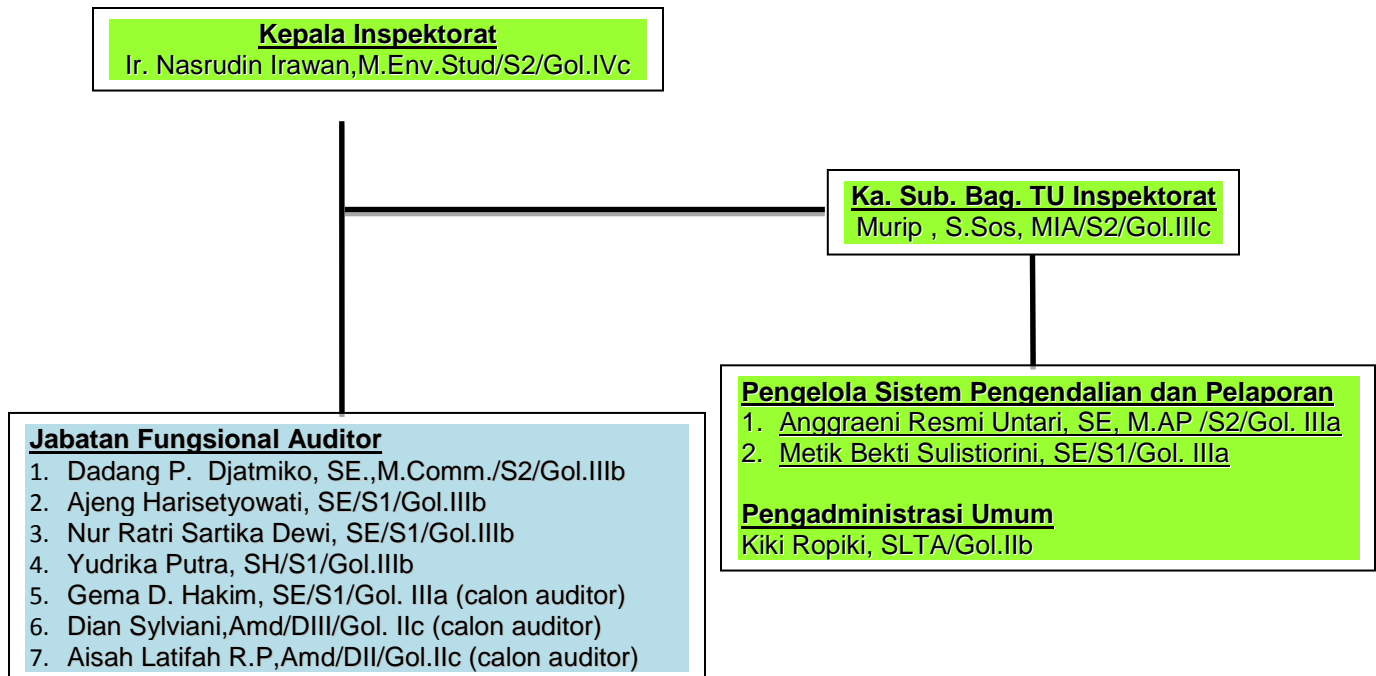
## **1.3 FUNGSI**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Pasal 142 C menyatakan, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program pengawasan yang meliputi anggaran, kepegawaian, perlengkapan, dan akuntabilitas;
- b. pelaksanaan pengawasan anggaran, kepegawaian, perlengkapan dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat.

## 1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Kepala Inspektorat BSN bertanggungjawab kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional dan membawahi Subbagian Tata Usaha Inspektorat dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur organisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :



Tabel 1. Jumlah pegawai APIP tahun 2013-2015

NO	Jabatan	2013	2014	2015
1.	Kepala Inspektorat	1	1	1
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	1	1	1
3.	Auditor	4	4	4
4.	Calon Auditor	0	0	3
4.	Pengelola Sistem Pengendalian dan Pelaporan	0	1	2
5.	Pengadministrasi	1	1	1
<b>JUMLAH</b>		<b>7</b>	<b>8</b>	<b>12</b>

## 1.5 LINGKUNGAN STRATEGIS

Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan. Untuk itu, reformasi birokrasi akan dilaksanakan di seluruh Kementerian/lembaga (termasuk BSN). Selanjutnya dalam penyusunan perencanaan dan anggaran, akan diterapkan sistem anggaran berbasis kinerja secara menyeluruh. Reformasi ini diharapkan dapat membuahkan hasil yang positif khususnya dalam perbaikan pelayanan publik, efektivitas dan akuntabilitas serta kegiatan pencegahan korupsi di BSN.

Program pengawasan merupakan bagian penting dari agenda pembangunan bidang penyelenggaraan negara dalam upaya untuk mempercepat proses reformasi, dan penciptaan tata pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab dan berwibawa, untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis dan adil.

Badan Standardisasi Nasional (BSN), dengan visi ***"Menjadi lembaga terpercaya dalam mengembangkan Standar Nasional Indonesia untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional sesuai dengan perkembangan IPTEK"***, berupaya memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk mendukung pembangunan ekonomi.

Inspektorat dibentuk berdasarkan keperluan manajemen dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk memberikan informasi, masukan, koreksi dan rekomendasi/solusi, agar pelaksanaan program dan kegiatan di BSN tercapai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara efektif, efisien dan ekonomis. Peran pengawasan dilaksanakan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang diinginkan.

Sebagaimana dinyatakan pada tugas Inspektorat, melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BSN, maka Inspektorat mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BSN yang dipertegas dengan fungsi pelaksanaan pengawasan terhadap anggaran, kepegawaian, perlengkapan dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam fungsi butir b.

Untuk memenuhi itu semua, Inspektorat melaksanakan program **“Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN.”** dengan kegiatan **“Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN.”**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat yang dilakukan melalui kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN, dilaksanakan melalui :

- Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
- Pelaksanaan Audit Internal
- Reviu atas Laporan Keuangan
- Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BSN
- Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
- Pengendalian Internal
- Pengawasan Lainnya (PMPRB, PPK, LHKASN, LHKPN, WBS, Gratifikasi, Benturan Kepentingan)
- Pemantauan dan
- Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Apabila yang telah diuraikan di atas merupakan lingkungan stratejik internal, maka yang teridentifikasi sebagai lingkungan stratejik eksternal dan mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat BSN adalah dengan :

- a. Tumbuh dan meningkatnya respon positif terhadap aktifitas Inspektorat dalam rangka meningkatkan hubungan koordinatif dan konsultatif yang bersifat kemitraan dan keterkaitan dengan unit kerja di BSN
- b. Semakin meningkatnya iklim keterbukaan mendukung peningkatan dan optimalisasi fungsi Inspektorat
- c. Komitmen yang tinggi pimpinan BSN terhadap penyelenggaraan pengawasan
- d. Telah terjalinnya kerjasama dengan pihak BPK dan BPKP dalam pengawasan dan sistem pengendalian intern
- e. Dimungkinkannya kerjasama dalam pengawasan dengan KPK. khususnya mengenai KKN.

Tabel 2. Nilai Reformasi Birokrasi BSN tahun 2013-2015

NO.	NILAI	2013	2014	2015
1.	Reformasi Birokrasi	53	54.22	68.29

Tabel 3. Nilai LAKIP BSN tahun 2013-2015

NO.	KRITERIA	2012	2013	2014	2015
1.	Perencanaan Kinerja	19.69	23.04	24.18	19.92
2.	Pengukuran Kinerja	10.58	11.35	11.25	15.80
3.	Pelaporan Kinerja	9.36	9.63	9.78	10.28
4.	Evaluasi Internal	5.42	6.14	6.26	5.85
5.	Capaian Kinerja	13.25	12.79	13.34	12.35
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>58.21</b>	<b>62.95</b>	<b>63.81</b>	<b>64.20</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>CC</b>	<b>CC</b>	<b>CC</b>	<b>B</b>

Tabel 4. Anggaran Inspektorat tahun 2013-2015

NO.	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2013	Rp. 1.115.313.000,-	Rp. 848.275.000,-	76.06%
2	2014	Rp. 867.866.000,-	Rp. 766.560.200,-	88.33%
3	2015	Rp. 1.071.874.000,-	Rp. 1.052.634.415,-	98.21%

Tabel 5. Opini BPK

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	-
Tahun	2006	2007	2008	2009	2010
Opini	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP



## **1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN**

**Bab I Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas latar belakang, kedudukan, tugas dan fungsi, serta struktur organisasi termasuk Sumber Daya Manusia, dan aspek strategis Inspektorat-BSN.

**Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**, pada bab ini dijelaskan secara ringkas terkait dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan dan komponen anggaran yang tersedia bagi Inspektorat dalam Tahun 2015, meliputi Rencana Strategis Inspektorat-BSN Tahun 2015-2019.

**Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015**, Di bab ini menjelaskan telaahan atas pencapaian kinerja Inspektorat-BSN yang dihubungkan dengan pertanggungjawabannya atas pencapaian sasaran pada Tahun 2015.

**Bab IV Penutup**, menjelaskan simpulan keseluruhan atas Laporan Kinerja Inspektorat-BSN Tahun 2015 dan menyampaikan hal-hal atau rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 Umum**

Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Dengan kegiatan pengawasan & pemeriksaan yang komprehensif dan pembinaan serta komunikasi yang baik antar unit, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah, terutama di bidang kontrol/pengawasan serta dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif, sehingga dihasilkan kegiatan yang lebih terarah dan selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta memperhatikan kewenangannya Inspektorat, yang berdiri pada tahun 2006 (baru berumur ± 9 Tahun), sudah terlihat perannya yang semakin ke depan semakin diperlukan keberadaannya. Untuk lebih meningkatkan fungsinya dan agar lebih efektif dan efisien, maka diperlukan dokumen perencanaan yang baik dukungan aparatur pengawasan yang profesional, bertanggung jawab dan berwibawa serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Aparatur pengawasan juga harus mampu menjunjung tinggi kode etik dan disiplin, sehingga dapat memberikan pelayanan prima serta penyediaan masukan atau informasi yang cepat, tepat dan akurat. Dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja yang telah disusun digunakan sebagai pedoman kegiatan selama tahun 2015 dan dilaksanakan secara maksimal agar tercapai target yang telah diperjanjikan.

## 2.2 VISI DAN MISI

### 2.2.1 Visi

Fungsi Inspektorat BSN adalah melaksanakan pengawasan (fungsi kontrol), yaitu melaksanakan salah satu fungsi manajemen, dalam hal ini menjadi alat bantu Kepala Badan dalam mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan badan oleh unit-unit kerja sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. Selain itu juga menjadi salah satu sumber masukan Kepala Badan dalam pengambilan langkah-langkah dan penetapan kebijakannya.

Pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan badan harus dapat dipertanggungjawabkan (*akuntabel*). Akuntabilitas terwujud jika pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan secara terbuka dan transparan. Terbuka dapat diterjemahkan sebagai sikap antisipatif terhadap berbagai masukan konstruktif dari semua pihak terkait, baik dari dalam maupun dari luar. Dari sikap ini diharapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat berhasil dan berdaya guna, serta berlangsung secara transparan. Keterbukaan dan transparansi dimaksudkan sebagai upaya pencegahan berbagai bentuk pemborosan dan penyimpangan pengelolaan sumber daya serta praktek-praktek yang tidak sesuai peraturan perundangan yang berlaku seperti praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dalam upaya mewujudkan akuntabilitas kinerja di atas, diperlukan unit pengawasan yang profesional dan mandiri baik sistem maupun sumber daya manusianya, sehingga mampu memberikan kontribusi dan masukan secara objektif dan konstruktif untuk perbaikan manajemen serta langkah-langkah pengambilan keputusan dan kebijakan oleh pimpinan BSN. Untuk hal ini Inspektorat merumuskan dan menetapkan visi :

**“Menjadi Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang profesional, independen dan mampu menjadi Katalisator Pencapaian Tujuan Sasaran Strategis BSN”.**

Visi ini menyatakan maksud, bahwa Inspektorat dan segenap personelnya mempunyai cita-cita, keinginan dan harapan untuk menjadi institusi atau unit yang bekerja sesuai

dengan peraturan perundangan dan dapat bertindak sebagai penjamin mutu ( *quality assurance* ) dalam penyelenggaraan program dan kegiatan, guna mencapai visi dan misi BSN.

Dengan visi tersebut diharapkan pula tumbuh dan tercipta pemahaman dari segenap personel unit kerja di lingkungan BSN akan fungsi pengawasan, yang pada gilirannya dapat terwujud dukungan dan kerjasama yang baik dalam menyelenggarakan dan menegakkan pemerintahan yang akuntabel di BSN.

### **2.2.2 Misi**

Untuk merealisasikan visi di atas, Inspektorat BSN menetapkan misi sebagai berikut :

- 1) “Memastikan tercapainya Tujuan dan Strategis BSN”.**
- 2) “Memastikan terwujudnya iklim yang mampu mencegah KKN di Lingkungan BSN”**

Hubungan visi dan misi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Rumusan misi pertama tersebut mencerminkan tekad dan komitmen dari pemimpin dan seluruh personel Inspektorat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan pengawasan yang terpercaya dengan upaya mencegah dan mengidentifikasi potensi penyimpangan dan pelanggaran mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan atas kegiatan.

Pendekatan yang dilakukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang diselenggarakan oleh Inspektorat dilakukan dengan tidak mencari kesalahan tetapi pendekatannya dilakukan melalui identifikasi ketidaksesuaian dengan peraturan perundangan. Upaya ini membawa dampak dari tahun ketahun dalam pelaksanaan pengawasan Unit Kerja di Lingkungan BSN semakin baik dan lebih harmonis.

## **2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019, **Pembangunan Layanan Infrastruktur Mutu** merupakan salah satu arah kebijakan dan strategi BSN 2015-2019 yang berperan dalam pelaksanaan sub-agenda prioritas 7 yaitu **Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi** dalam rangka

pelaksanaan agenda prioritas 6 dari Nawa-Cita yaitu **Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional**. Dalam hal ini, Pembangunan Layanan Infrastuktur Mutu diarahkan untuk mencapai **Peningkatan dukungan IPTEK bagi daya-saing sektor produksi**.

Inspektorat turut serta mendukung dan melaksanakan beberapa hal melalui **Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal di BSN**.

Menindaklanjuti hal tersebut Inspektorat merumuskan tujuan, sasaran strategis dan batasan serta pelaksanaannya sebagai berikut :

### **2.3.1 Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari rumusan misi yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai, dengan demikian tujuan yang dirumuskan adalah :

- 1) Terlaksananya Program dan Kegiatan sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan BSN
- 3) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BSN

### **2.3.2 Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai Inspektorat tahun 2015 meliputi sasaran kualitatif dan sasaran kuantitatif, yaitu:

- 1) Terselenggaranya perbaikan pengelolaan kegiatan dan program di lingkungan BSN, melalui Tindak Lanjut Hasil Audit. (100%)
- 2) Terselenggaranya perbaikan pengelolaan kegiatan dan program di lingkungan BSN, melalui Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. (100%)
- 3) Terselenggaranya penyusunan rencana pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal unit kerja di BSN. (11 dokumen)
- 4) Terselenggaranya Tindak Lanjut Rencana Tindak Pengendalian di unit kerja. (50%)
- 5) Terselenggaranya Tindak Lanjut penyelesaian rencana aksi Reformasi Birokrasi. (70%)
- 6) Terselenggaranya Tindak lanjut aduan masyarakat. (70%)

- 7) Terselenggaranya Tindak lanjut aduan melalui WBS. (70%)
- 8) Terselenggaranya Tindak lanjut pengelolaan gratifikasi. (80%)
- 9) Terselenggaranya Tindak lanjut penanganan benturan kepentingan. (60%)

Berdasarkan rumusan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan Inspektorat menjadi upaya yang akan dicapai secara tahunan selama kurun waktu periode Renstra 2015-2019.

#### 2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Rumusan indikator kinerja utama yang digunakan untuk alat ukur keberhasilan atas sasaran dalam merialisasikan tujuan yang ditetapkan dalam renstra tahun 2015-2019 digambarkan sebagaimana tersaji sebagai berikut :

<b>Tujuan 1 : Terlaksananya Program dan Kegiatan sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</b>	
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>
1. Terselenggaranya perbaikan pengelolaan kegiatan dan program di lingkungan BSN, melalui Tindak Lanjut Hasil Audit.	1. Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit.
2. Terselenggaranya perbaikan pengelolaan kegiatan dan program di lingkungan BSN, melalui Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	2. Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
<b>Tujuan 2 : Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan BSN</b>	
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>
1. Terselenggaranya penyusunan rencana pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal unit kerja di BSN.	1. Jumlah Dokumen Rencana Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Unit Kerja di BSN

2. Terselenggaranya Tindak Lanjut Rencana Tindak Pengendalian di unit kerja	2. rata-rata presentase penyelesaian tindak lanjut Rencana Tindak Pengendalian
<b>Tujuan 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BSN</b>	
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>
1. Terselenggaranya Tindak Lanjut penyelesaian rencana aksi Reformasi Birokrasi	1. Prosentase Penyelesaian tindak lanjut rencana aksi Reformasi Birokrasi
2. Terselenggaranya Tindak lanjut aduan masyarakat	2. Prosentase Penyelesaian Tindak lanjut aduan masyarakat
3. Terselenggaranya Tindak lanjut aduan melalui WBS	3. Prosentase Penyelesaian Tindak lanjut aduan 4. melalui WBS
4. Terselenggaranya Tindak lanjut pengelolaan gratifikasi	5. Prosentase Penyelesaian Tindak lanjut pengelolaan gratifikasi
5. Terselenggaranya Tindak lanjut penanganan benturan kepentingan	6. Prosentase Penyelesaian Tindak lanjut penanganan benturan kepentingan

## 2.5 KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Dalam merealisasikan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas, upaya yang ditempuh Inspektorat adalah melalui penetapan kebijakan dan melaksanakan program serta kegiatan yang telah dirumuskan.

Arah kebijakan dimaksud yaitu :

- 1) Meningkatkan efektivitas pengawasan fungsional di lingkungan aparatur Lembaga/Badan melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal dan eksternal**

## 2) Meningkatkan pengetahuan/pemahaman dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sedang program yang akan dilaksanakan termasuk pada “**Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN**”, untuk kegiatan akan diuraikan pada Bab Akuntabilitas Kinerja.

Gambaran sasaran, kebijakan dan program Inspektorat tahun 2015 - 2019 tersaji sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 6. Sasaran Strategis, Kebijakan dan Program**

No	Sasaran Strategis	Kebijakan	Program
1.	Terselenggaranya perbaikan pengelolaan kegiatan dan program di lingkungan BSN, melalui Tindak Lanjut Hasil Audit.	1. Meningkatkan efektivitas pengawasan fungsional di lingkungan aparatur Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal dan eksternal	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN
2.	Terselenggaranya perbaikan pengelolaan kegiatan dan program di lingkungan BSN, melalui Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan		
3.	Terselenggaranya penyusunan rencana pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal unit kerja di BSN.	2. Pemahaman dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN
4.	Terselenggaranya Tindak Lanjut Rencana Tindak Pengendalian di unit kerja		
5.	Terselenggaranya Tindak Lanjut penyelesaian rencana aksi Reformasi Birokrasi		
6.	Terselenggaranya Tindak lanjut aduan masyarakat		
7.	Terselenggaranya Tindak lanjut aduan melalui WBS		
8.	Terselenggaranya Tindak lanjut		



	pengelolaan gratifikasi		
9.	Terselenggaranya Tindak lanjut penanganan benturan kepentingan		

Rencana strategik yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, cara mencapai tujuan dan kegiatan tersaji dalam Rencana Strategik Tahun 2015-2019 sebagaimana Lampiran.

Rumusan sasaran yang ingin dicapai tersebut, memiliki indikator dan target kinerja. Rumusan tersebut merupakan upaya pelaksanaan sistem akuntabilitas dan pemenuhan peraturan MENPAN No.PER/09/ M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. Untuk hal itu Kepala Inspektorat BSN telah menetapkan Indikator Utama terhadap sasaran yang ingin dicapai. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama dan target tahun 2015-2019 tersaji pada tabel berikut :

**Tabel 7. Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja tahun 2015-2019 Inspektorat BSN**

No:	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terselenggaranya perbaikan pengelolaan kegiatan dan program di lingkungan BSN, melalui Tindak Lanjut Hasil Audit.	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit	%	100%
2.	Terselenggaranya perbaikan pengelolaan kegiatan dan program di lingkungan BSN, melalui Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	%	100%

3.	Terselenggaranya penyusunan rencana pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal unit kerja di BSN.	Jumlah Dokumen Rencana Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Unit Kerja di BSN	Dok.	11 dokumen
4.	Terselenggaranya Tindak Lanjut Rencana Tindak Pengendalian di unit kerja	Prosentase penyelesaian tindak lanjut Rencana Tindak Pengendalian	%	90%
5.	Terselenggaranya Tindak Lanjut penyelesaian rencana aksi Reformasi Birokrasi	Prosentase Penyelesaian tindak lanjut rencana aksi Reformasi Birokrasi	%	90%
6.	Terselenggaranya Tindak lanjut aduan masyarakat	Prosentase Penyelesaian Tindak lanjut aduan masyarakat	%	90%
7.	Terselenggaranya Tindak lanjut aduan melalui WBS	Prosentase Penyelesaian Tindak lanjut aduan melalui WBS	%	90%
8.	Terselenggaranya Tindak lanjut pengelolaan gratifikasi	Prosentase Penyelesaian Tindak lanjut pengelolaan gratifikasi	%	100%
9.	Terselenggaranya Tindak lanjut penanganan benturan kepentingan	Prosentase Penyelesaian Tindak lanjut penanganan benturan kepentingan	%	90%

## 2.6 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, maka Inspektorat perlu menetapkan kinerja atas sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama yang telah dirumuskan di muka.

Penetapan kinerja tersebut merupakan tolok ukur yang akan dicapai dalam menentukan keberhasilan Inspektorat dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2015.

Rumusan tersebut merupakan upaya pelaksanaan sistem akuntabilitas dan pemenuhan peraturan MENPAN No.PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. Untuk hal itu Kepala Inspektorat BSN telah menetapkan Indikator Kinerja Utama terhadap sasaran yang ingin dicapai. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama dan target tahun 2015 tersaji pada tabel berikut :

**Tabel 8. Indikator Kinerja dan Target Inspektorat BSN Tahun 2015**

Sasaran 1 : Terselenggaranya perbaikan pengelolaan kegiatan dan program di lingkungan BSN, melalui tindak lanjut penyelesaian rekomendasi atas hasil pengawasan dan pemeriksaan.		
Kebijakan 1: Meningkatkan efektivitas pengawasan fungsional di lingkungan aparatur lembaga melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal dan eksternal.		
Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN		
Kegiatan/Komponen	Indikator Kinerja	Target
Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN, mencakup :		
1.Penyusunan PKPT	Program KPT	2 (dua) laporan
2.Pelaksanaan Audit Operasional	Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil audit internal	100 %
3.Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Hasil Reviu Laporan Keuangan (HRLK)	3 (tiga) Laporan
4.Pengelolaan TLHP	Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal	100 %

**Tabel 8. Indikator Kinerja dan Target Inspektorat BSN Tahun 2015  
(Lanjutan)**

Sasaran 2 : Terwujudnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern di berbagai unit kerja di lingkungan BSN.		
Kebijakan 2: Meningkatkan pemahaman dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.		
Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN		
Kegiatan/Komponen	Indikator Kinerja	Target
Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN, mencakup :		
1. Pengelolaan Pengendalian Internal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di Unit Kerja BSN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tindak Lanjut Penyelesaian Rencana Tindak Pengendalian</li> <li>- 11 Laporan Analisis Resiko Unit Kerja</li> </ul>
2. Evaluasi LAKIP BSN	Nilai evaluasi LAKIP – BSN meningkat	Nilai LAKIP-BSN naik ke nilai $\geq 65$ ( B )
3. Monitoring Pedoman Pengawasan Internal	Jumlah monitoring Pedoman Pengawasan Internal	1 (satu) dokumen Laporan
4. Pengawasan Lainnya	Jumlah dokumen pengelolaan pengawasan lainnya	1 (satu) dokumen Laporan
5. Kegiatan Pemantauan	Jumlah dokumen Pemantauan Kegiatan BSN	1(satu) dokumen Laporan
6. Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah dokumen penanganan pengaduan masyarakat	1 (satu) Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2015 yang memuat sasaran, kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja dan target, yang ditetapkan berdasarkan Renstra 2015-2019, dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) komponen kegiatan. Rencana kinerja tersebut merupakan batasan atau panduan yang akan direalisasikan pemenuhannya selama kurun waktu satu tahun. Penetapan Kinerjanya sebagaimana tersaji pada Lampiran-4.1.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat BSN tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Inspektorat tahun 2015 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja tersebut dicapai melalui pengukuran hasil pelaksanaan komponen kegiatan selama kurun waktu satu tahun, dengan memperhatikan :

- 1) Jumlah Audit Internal yang telah dilakukan.
- 2) Jumlah capaian tindak lanjut temuan/rekomendasi hasil audit dan pemeriksaan (internal dan eksternal).
- 3) Reviu dan evaluasi terhadap laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja.
- 4) Pengelolaan sistem pengendalian intern pemerintah di unit kerja.
- 5) Pengelolaan Pengawasan Lainnya.
- 6) Kegiatan Pemantauan.
- 7) Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan hasil pengukuran dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 9. Indikator Kinerja,Target atas Realisasi Kegiatan Inspektorat BSN Tahun 2015**

Sasaran 1 : Terselenggaranya perbaikan pengelolaan kegiatan dan program di lingkungan BSN, melalui tindak lanjut penyelesaian rekomendasi atas hasil pengawasan dan pemeriksaan					
Kebijakan 1: Meningkatkan efektivitas pengawasan fungsional di lingkungan aparatur lembaga melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal dan eksternal.					
Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN					
Kegiatan : Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN					
Komponen	Indikator Kinerja	Realisasi	Target	Realisasi	%
		2014	2015	2015	2015
1.Penyusunan PKPT	1.Program KPT	2 (dua) laporan	2 (dua) laporan	2 (dua) laporan	100
2. Pelaksanaan Audit Operasional	2.Prosentasi penyelesaian tindak lanjut hasil audit internal	100 %	100 %	75 %	90
3. Reviu Laporan Keuangan	3.Jumlah hasil reviu laporan keuangan (HRLK)	3 (tiga) Laporan	3 (tiga) Laporan	3 (tiga) Laporan	100
4.Pengelolaan TLHP	4.Prosentasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal	98 %	100%	95%	95

Keterangan :

- Komponen 2 : terdapat tindaklanjut yang masih dalam proses penyelesaian.
- Komponen 4 : terdapat tindaklanjut yang masih dalam proses penyelesaian.

**Tabel 9. Indikator Kinerja, Target atas Realisasi Kegiatan Inspektorat BSN Tahun 2015  
(lanjutan)**

Sasaran 2 : Terwujudnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern di berbagai unit kerja di lingkungan BSN.					
Kebijakan 2 : Meningkatkan pemahaman dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.					
Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN					
Kegiatan : Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN					
Komponen	Indikator Kinerja	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	% 2015
1. Pengelolaan Pengendalian Internal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di Unit Kerja BSN	- 1 dokumen Perka Grand Design SPIP - 11 Laporan Analisis Resiko Unit Kerja	- Tindak Lanjut Penyelesaian Rencana Tindakan Pengendalian - 11 Laporan Analisis Resiko Unit Kerja	- Tindak Lanjut Penyelesaian Rencana Tindakan Pengendalian - 11 Laporan Analisis Resiko Unit Kerja	100
2. Evaluasi LAKIP - BSN	Hasil Evaluasi LAKIP – BSN meningkat	Nilai LAKIP-BSN adalah 63,81 (CC)	Nilai LAKIP-BSN naik ke nilai $\geq 65$ ( B )	Nilai LAKIP-BSN adalah 64,20 (B)	98,77
3. Pengawasan Lainnya	Jumlah dokumen Pengelolaan pengawasan lainnya	1 (satu) dokumen laporan - Seminar Anti Korupsi - FGD FILI - LHKPN - Perka Gratifikasi - Perka	1 (satu) dokumen Laporan - Seminar Anti Korupsi - FGD FILI - LHKPN - Perka Gratifikasi - Perka Dumas	1 (satu) dokumen laporan - Seminar Anti Korupsi - FGD FILI - LHKPN - Perka Gratifikasi - Perka Dumas	100



		Dumas - Perka Benturan Kepetingan - Perka WBS - PPK Inpres WBK 5 unit kerja	- Perka Benturan Kepetingan - Perka WBS - PPK Inpres - WBK 5 unit kerja	- Perka Benturan Kepetingan - Perka WBS - PPK Inpres - LHKASN	
4. Kegiatan Pemantauan	Jumlah dokumen kegiatan pemantauan	-	- Laporan Rapat Kerja Inspektorat, - Pemantauan Rencana Aksi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• PMPRB</li> <li>• Analisis resiko</li> <li>• LHKPN</li> </ul>	- Laporan Rapat Kerja Inspektorat, - Pemantauan Rencana Aksi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• PMPRB</li> <li>• Analisis resiko</li> <li>• LHKPN</li> </ul>	100
5. Penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah dokumen adaun masyarakat	-	6 Aduan Masyarakat	6 Aduan Masyarakat	100

Keterangan :

Komponen 1 : Tindak lanjut pemantauan RTP semester libaru bisa dipantau ditahun berikutnya.

Komponen 2 : Nilai LAKIP dari target 65 tercapai 64,20

Komponen 3 : WBK tidak bisa dinilai internal karena ada kebijakan baru, namun ada tambahan indikator berupa pengisian LHKASN dan terlaksana 100%

### 3.2 ANALISIS CAPAIAN SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN NON IKU TAHUN 2015

**A. Sasaran Strategis-1 : Terselenggaranya perbaikan pengelolaan kegiatan dan program di lingkungan BSN, melalui tindak lanjut penyelesaian rekomendasi atas hasil pengawasan dan pemeriksaan**

Sasaran strategis 1 ini, direalisasikan melalui kegiatan **Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN** yang merupakan satu-satunya kegiatan yang dikelola Inspektorat-BSN. Kegiatan ini memiliki 2 (dua) komponen kegiatan dalam upaya *mencapai* target indikator kinerja yang telah ditetapkan

Komponen	Indikator Kinerja	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	% 2015
1.Penyusunan PKPT	1.Program KPT	2 (dua) dokumen - PKPT 2014 - UPKPT 2015	2 (dua) dokumen - PKPT 2015 - UPKPT 2016	2 (dua) dokumen - PKPT 2015 - UPKPT 2016	100
2.Pelaksanaan Audit Operasional	2.Prosentasi penyelesaian tindak lanjut hasil audit internal	100 %	100 %	75 %	90
3.Reviu Laporan Keuangan	3.Jumlah reviu laporan keuangan (RLK)	3 (tiga) Laporan - Unaudited 2013 - Audited 2013 - Semester I 2014	3 (tiga) Laporan - Unaudited 2014 - Audited 2014 Semester I 2015	3 (tiga) Laporan - Unaudited 2014 - Audited 2014 Semester I 2015	100
4.Pengelolaan TLHP	4.Prosentasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal	98 %	100 %	95 %	95
<b>Capaian Rata-rata Realisasi Indikator Kinerja</b>					<b>96,25</b>

Keterangan:

Komponen 2 : TLHA yang masih dalam proses

Komponen 4 : TLHP yang masih dalam proses

### 3.2.A.1. Analisis Kinerja Capaian Sasaran IKU

Sebagaimana dijelaskan di atas, analisis capaian indikator kinerja ini masing-masing dicapai melalui penyelenggaraan Komponen Kegiatan, hal ini dikarenakan Inspektorat – BSN tidak memiliki Sub Kegiatan.

## 1) Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil audit internal

Audit merupakan salah satu fungsi utama dari tugas Inspektorat dalam pelaksanaan pengawasan internal. Pelaksanaan audit ini dilakukan oleh Tim Auditor yang ditugaskan oleh Kepala Inspektorat/Inspektur sesuai dengan PKPT Tahun 2015 melalui Tim Audit Internal BSN untuk Tahun Anggaran 2015 terhadap :

- I. Kedeputian Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi, meliputi kegiatan :
  1. Kerjasama Standardisasi
  2. Penelitian dan Pengembangan Standardisasi
  3. Perumusan Standar
- II. Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi, meliputi kegiatan
  1. Peningkatan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi
  2. Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi
  3. Peningkatan Penerapan Standar
- III. Kedeputian Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi, meliputi kegiatan :
  1. Peningkatan Informasi dan Dokumentasi Standardisasi
  2. Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi
- IV. Kesestamaan Badan Standardisasi Nasional, meliputi kegiatan :
  1. Peningkatan Pelayanan Hukum, Organisasi dan Humas BSN
  2. Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
  3. Peningkatan Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN
  4. Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Intern BSN
  5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik BSN
- V. Adminstrasi dalam pelaksanaan audit operasional

Pelaksanaan audit operasionalnya diselenggarakan per triwulan sesuai program dan kegiatan, termasuk realisasi fisik dan keuangan, seperti pada :

- 1) Audit Semester I PNBP, sesuai Surat Tugas Kepala Inspektorat No.068.b/Inspektorat/ST/ 06/2015, Tanggal 1 Juni 2015;
- 2) Audit Semester I Kinerja Keuangan, sesuai Surat Tugas Kepala Inspektorat No.88/Inspektorat/ST/ VIII/2015, Tanggal 19 Agustus 2015;
- 3) Audit Triwulan III PNBP, sesuai Surat Tugas Kepala Inspektorat No.112a/Inspektorat/ST/10/2015, Tanggal 8 Oktober 2015;
- 4) Audit Triwulan III Kinerja Keuangan, sesuai Surat Tugas Kepala Inspektorat No. 112b/Inspektorat/ST/10/2015, Tanggal 8 Oktober 2014
- 5) Audit Triwulan IV PBJ, sesuai Surat Tugas Kepala Inspektorat No.129b/Inspektorat/ST/XII/2015, Tanggal 7 Desember 2015, pelaksanaannya dikhususkan pada Audit Pengadaan Barang dan Jasa, meliputi keseluruhan realisasi Belanja Modal dan Belanja Barang (Non Honor di atas Rp.100.000.000,-).

Untuk Audit Triwulan IV, dikhususkan pada audit pengadaan barang dan jasa, karena Audit Triwulan IV tidak dilakukan secara keseluruhan pada pertanggungjawaban penggunaan keuangan, hal ini mengingat terbatasnya waktu pemeriksaan pada akhir tahun anggaran.

Keempat audit tersebut dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan dan pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Audit dilakukan dalam kegiatan komponen pelaksanaan audit operasional terhadap satu Satuan Kerja (Satker) di BSN yang dilaksanakan terhadap 4 (empat) PPK. yang mengelola 3 (tiga) program dan 13 (tiga belas) kegiatan, termasuk kegiatan dengan sumber dana PNBP. Keempat PPK dan program serta kegiatan yang dikelola adalah :

- (1) PPK Biro PKT, Biro HOH dan Inspektorat, mengelola program dan kegiatan:
  - a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN, dengan kegiatan :
    - Peningkatan Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN,

- Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN.
  - Peningkatan Pelayanan Hukum, Organisasi dan Humas BSN.
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BSN, dengan kegiatan :
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik BSN.
- c) Program Pengembangan Standardisasi Nasional, dengan kegiatan :
- Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- (2) PPK PUSLITBANG, PERUMUSAN dan PKS, mengelola program dan kegiatan :
- a) Program Pengembangan Standardisasi Nasional, dengan kegiatan :
- Penelitian dan Pengembangan Standar.
  - Perumusan Standardisasi.
  - Kerjasama Standardisasi
- (3) PPK PSPS, PALLI dan PALS mengelola program dan kegiatan :
- a) Program Pengembangan Standardisasi Nasional, dengan kegiatan :
- Peningkatan Penerapan Standar.
  - Peningkatan Akreditasi Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi, kecuali kegiatan dengan sumber dana PNBPN.
  - Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi, kecuali kegiatan dengan sumber dana PNBPN
- (4) PPK PUSIDO dan PUSDIKMAS, mengelola program dengan kegiatan :
- a) Program Pengembangan Standardisasi Nasional, dengan kegiatan :
- Informasi dan Dokumentasi Standardisasi, kecuali kegiatan dengan sumber dana PNBPN.
  - Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi, kecuali kegiatan dengan sumber dana PNBPN.
- (5) ALBP mengelola penerimaan – PNBPN.

Pada Tahun Anggaran 2015 ini terjadi peningkatan kinerja audit yaitu dengan adanya peningkatan atas respon dari semua Auditi terhadap rekomendasi Laporan Hasil Audit

(LHA) Internal. Kondisi ini ditunjukkan dari kerjasama yang baik dan tanggapan serta tindak lanjut atas LHA yang disampaikan Auditor kepada Tim Auditor.

Hasil dari keempat periode audit tersebut sebagaimana ditunjukkan dalam bentuk rekomendasi berikut ini :

- a) Pada audit PNBPN I Semester, terdapat 9 rekomendasi;
- b) Pada audit Kinerja Keuangan Semester I, terdapat 28 rekomendasi;
- c) Pada audit PNBPN triwulan III, tidak terdapat rekomendasi;
- d) Pada audit Kinerja Keuangan triwulan III, terdapat 23 rekomendasi;

#### **Kesimpulan :**

Terhadap 35 rekomendasi dari audit internal pada tahun 2015 itu telah ditindak lanjut, dengan demikian Prosentase rekomendasi audit internal yang ditindak lanjut capaian adalah 90%.

Dari gambaran yang diuraikan di atas, tercermin bahwa tindak lanjut hasil audit internal tersebut dapat terealisasi dengan baik dan laporannya dituangkan dalam 4 (empat) dokumen laporan dan disampaikan kepada Kepala BSN.

Target tahun 2015 : 100 % rekomendasi audit internal yang ditindak lanjut

Realisasi tahun 2015 : 100 % rekomendasi audit internal dapat diselesaikan.

## **2) Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal**

Sebelum pelaksanaan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 BSN oleh BPK-RI pada Tanggal 30 Januari hingga 13 April 2015, BSN melalui Inspektorat menyelenggarakan Entry Meeting di Ruang Rapat Inspektorat Lt. 13 - BSN Tanggal 3 Pebruari 2015. Penanggungjawab Tim Pemeriksa BPK-RI menyampaikan pemeriksaan yang dilakukan BPK dalam rangka menilai pertanggungjawaban Laporan Keuangan BSN Tahun 2014. Pertanggungjawaban tersebut meliputi Neraca Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Catatan Laporan Keuangan (CaLK), pemeriksaan ini adalah untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan dengan

SAP; kecukupan informasi keuangan; kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan keuangan dan efektifitas Sistem Pengendalian Internal.

Pada tanggal 14 April 2015 oleh BPK-RI disampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan 5 temuan dan 12 rekomendasi. Atas temuan tersebut telah dilakukan pemenuhan 12 rekomendasi sesuai laporan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)-BPK-RI yang disampai ke Kementerian Keuangan dan BPK, yaitu pada bulan Juli dan September 2015. Pada akhir tahun 2015 realisasi penyelesaian TLHP sudah mencapai 95 % sesuai rencana aksi.

Terhadap laporan keuangan tersebut BSN kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan BSN tahun 2014 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dengan diterimanya penghargaan WTP pada tahun 2014, maka untuk yang ke-7 kalinya secara berturut-turut, BSN berhasil mempertahankan predikat tersebut sejak tahun 2008. Keberhasilan BSN dalam meraih predikat WTP, merupakan wujud nyata komitmen pimpinan BSN beserta jajarannya, dalam meningkatkan kinerja serta akuntabilitas keuangan BSN.

## **Kesimpulan**

Terhadap 5 temuan dengan 12 rekomendasi dan 12 rekomendasi telah ditindak lanjuti terhadap pemeriksaan eksternal yang dilakukan oleh BPK-RI pada tahun 2015 itu, disimpulkan bahwa persentasi rekomendasi pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti capainnya adalah 95%. (tambahkan misal : pendekatan penilaian, bila selesai dan tepat waktu nilai 100%, dilaksanakan namun tidak selesai maka sesuai bobot pelaksanaan, bila selesai namun tidak sesuai jadwal maka dinilai 95%)

Dari gambaran yang diuraikan di atas, tercermin bahwa tindak lanjut hasil pemerisaan eksternal tersebut dapat ditindak lanjuti dengan baik.

Target tahun 2015 : 100 % rekomendasi pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti

Realisasi tahun 2015 : 95 % rekomendasi pemeriksaan eksternal dapat diselesaikan.

### 3.2.A.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Non IKU

Selain 2 (dua) indikator kinerja yang telah diuraikan di atas ada 3 (tiga) indikator kinerja lain dalam mengukur keberhasilan sasaran strategis - 1 tersebut.

#### 1) Program Kerja Pengawasan Tahunan (Program KPT)

Rumusan Program kerja ini dilakukan melalui penyelenggaraan pembahasan pada komponen kegiatan Penyusunan Program KPT. Program KPT tersebut merupakan pemandu dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan di Inspektorat terutama dalam pengawasan internal dan pengembangan untuk para Auditor. Program tersebut selain memuat rencana apa yang akan dilakukan, juga dikemukakan batasan waktunya. Program kerja pengawasan ini merupakan tindak lanjut dan penyempurnaan atas (pelaksanaan) Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan 2015 yang konsepnya dipersiapkan di tahun 2014.

Sebagaimana tahun 2014, untuk Program KPT Tahun 2015, juga dilakukan pembahasan Usulan Program KPT Tahun 2016, yang pembahasannya dilakukan pada bulan November 2015, dengan memperhatikan perubahan kebijakan dalam pengelolaan keuangan BSN di tahun 2015, terutama untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sebanyak 4 (empat) PPK di tahun 2015 dan upaya peningkatan untuk nilai fungsional Auditor.

Berdasarkan data dan uraian di atas, capaian indikator kinerja Program KPT yang realisasinya dilakukan melalui kegiatan komponen Penyusunan Program KPT, persentasi capaiannya 100%.

#### **Kesimpulan :**

Target tahun 2015	: 2 (dua) dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) - 1 (satu) dokumen PKPT – Tahun 2015 - 1 (satu) dokumen Usulan PKPT – Tahun 2016
Realisasi tahun 2015	: 2 (dua) dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)



- 1 (satu) dokumen PKPT – Tahun 2015
- 1 (satu) dokumen Usulan PKPT – Tahun 2016

## **2) Jumlah Reviu Laporan Keuangan (JRLK)**

Aparat pengawasan intern pemerintah melakukan reviu atas Laporan Keuangan dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Pimpinan Lembaga kepada Presiden melalui Menteri Keuangan dan BPK, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006.

Menindaklanjuti amanat tersebut di atas, pada tahun 2015 telah dilakukan 3 (tiga) kali reviu terhadap laporan keuangan BSN. Kegiatan reviu laporan keuangan ini dilakukan untuk memberikan keyakinan kepada pimpinan akan kebenaran atas laporan keuangan yang dibuat sebelum disampaikan sebagai laporan keuangan dari lembaga kepada Kementrian Keuangan. Reviu laporan keuangan yang telah dilakukan, yaitu meliputi :

- (1) Reviu Laporan Keuangan TA. 2014 *Unaudited* , yaitu reviu laporan keuangan yang dilakukan sebelum pemeriksaan oleh BPK - RI,
- (2) Reviu Laporan Keuangan TA. 2014 *Audited* , yaitu reviu laporan keuangan yang dilakukan setelah pemeriksaan oleh BPK - RI,
- (3) Reviu Laporan Keuangan TA. 2015 Semester I, yaitu reviu terhadap laporan keuangan pada semester I tahun berjalan.

Berdasarkan hasil reviu, tidak terdapat perbedaan dan dapat diyakini bahwa laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Atas kerjasama dari semua pihak pengelola kegiatan dalam pelaksanaan anggaran tahun 2015, dan ke-4 PPK serta pihak penyaji laporan keuangan, opini BPK-RI menyatakan bahwa laporan dan pertanggungjawaban Tahun 2014, kembali men-dapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), untuk yang ketujuh kalinya sejak tahun 2008).



Foto 1. Sertifikat Penghargaan WTP

## Kesimpulan

Dari 3 (tiga) kali pelaksanaan reviu atas laporan keuangan BSN untuk anggaran tahun 2015 dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu. Kondisi yang baik ini tercermin dari kerjasama antara tim pembuat laporan keuangan dari Bagian Keuangan dan tim pelaksanaan reviu dari inspektorat.

Namun demikian, hal yang perlu diperhatikan adalah pengaturan waktu pembahasan dan kesiapan dokumen dan pendukungnya, terutama untuk reviu laporan keuangan *unaudited* dan laporan keuangan semester I.

Dari 3 (tiga) reviu tersebut, capaian indikator kinerja untuk sasaran strategis-1 itu adalah 100%, hal ini tergambar dari :

Target tahun 2015 : 3 (tiga) Laporan Hasil Reviu (LHR)

Realisasi tahun 2015 : 3 (tiga) Laporan Hasil Raviu (LHR)

## **B. Sasaran Strategis - 2 : Terwujudnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern di berbagai unit kerja di lingkungan BSN.**

Sebagaimana sasaran strategis 1, sasaran strategis 2 ini, juga direalisasikan melalui kegiatan “**Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN**”. Untuk merealisasikan sasarannya dalam mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan, kegiatan ini, mengoperasikan 1 (satu) komponen kegiatan.

Komponen	Indikator Kinerja	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	% 2015
1. Pengelolaan Pengendalian Internal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di Unit Kerja	1 Draft Dokumen Perka Grand Design SPIP	- Tindak Lanjut Penyelesaian RTP - 11 Laporan Analisis Resiko Unit Kerja	- Tindak Lanjut Penyelesaian Rencana Tindak Pengendalian - 11 Laporan Analisis Resiko Unit Kerja	100
2. Evaluasi LAKIP - BSN	Nilai LAKIP – BSN meningkat	Nilai LAKIP-BSN adalah 63,81 (CC)	Nilai LAKIP-BSN naik ke nilai $\geq 65$ ( B )	Nilai LAKIP-BSN adalah 64,20 (B)	98,77
3. Pengawasan Lainnya	Jumlah dokumen Pengelolaan pengawasan lainnya	1 (satu) dokumen laporan	1 (satu) dokumen Laporan - Seminar Anti Korupsi - FGD FILI - LHKPN - Perka Gratifikasi - Perka Dumas - Perka Benturan Kepetingan - Perka WBS - PPK Inpres - WBK 5 unit kerja	1 (satu) dokumen laporan - Seminar Anti Korupsi - FGD FILI - LHKPN - Perka Gratifikasi - Perka Dumas - Perka Benturan Kepetingan - Perka WBS - PPK Inpres - LHKASN	100
4. Kegiatan Pemantauan	Jumlah dokumen kegiatan pemantauan	-	Laporan Rapat Kerja Inspektorat	Laporan Rapat Kerja Inspektorat	100
5. Penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah dokumen aduan masyarakat	-	6 Aduan Masyarakat	6 Aduan Masyarakat	100
<b>Capaian Rata-rata Realisasi Indikator Kinerja</b>					<b>99,75</b>

Keterangan :

Komponen 2 : Nilai LAKIP dari target 65 tercapai 64,20

### 3.2.B.1. Analisis Kinerja Capaian Sasaran IKU

Analisis capaian indikator kinerja pada sasaran – 2 ini, dicapai dengan 1 (satu) Indikator yang masing-masingnya direalisasikan melalui penyelenggaraan 1 (satu) Komponen Kegiatan.

#### 1) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPIP) di Unit Kerja

Sebagaimana diamanatkan dalam PP.60 Tahun 2008 dan tindak lanjut pelaksanaan tahun 2015 telah dilakukan beberapa kegiatan di BSN. Kegiatan dimaksud antara lain :

##### a. Pengelolaan Pengendalian Intern

Pelaksanaan pengendalian intern ini dalam upaya melaksanakan apa yang diamanatkan dalam PP. 60 Tahun 2008 tersebut, secara nyata antara lain melalui penyelenggaraan

##### **Bimbingan Teknik Penerapan SPIP untuk Penilaian Resiko**

Bimbingan dimaksud guna memberikan pengetahuan, pemahaman dan cara mengidentifikasi, memetakan, menilai dan menganalisa resiko, terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Unit Kerja. Identifikasi dan penilaian resiko dilakukan dilingkungan Eselon II.

Pelaksanaan identifikasi permetaan dilakukan melalui penyampaian kuesioner secara sampling kepada Eselon I, II, III dan IV.

Untuk tindaklanjut penerapan SPIP tersebut, pada Inspektorat-BSN dilakukan kembali bimbingan teknis pada penilaian resiko oleh BPKP terhadap kegiatan utama, yaitu pada audit kinerja. Penilaian resiko tersebut menghasilkan :

- a) Daftar Resiko, identifikasi resiko pada tahap ini dilakukan melalui bisnis proses dan dengan resiko teridentifikasi terhadap sumber resiko, bisa dari dalam juga dapat dari luar.
- b) Peta Resiko, pada tahap ini dipetakan dampak resiko, yang dibagi dalam dampak kecil, sedang dan besar. Berdasarkan pada daftar resiko, peta ini menghasilkan tiga katagori resiko :

- Sangat segera untuk direspon dan ditindaklanjuti;
  - Segera direspon untuk ditindaklanjuti
  - Diabaikan namun diperhatikan agar tidak meningkat status resikonya.
- c) Pengendalian atas Resiko Utama, pada tahap kegiatan ini, melalui identifikasi dari bisnis proses dengan resiko teridentifikasi, akan diketahui kegiatan pengendalian baik secara preventif maupun mitigasi.
- d) Status dan Respon Resiko, melalui langkah ini diketahui resiko teridentifikasi, status resiko dan respon resiko.

#### **b. Identifikasi SPIP**

Dalam pelaksanaan SPIP yang telah diuraikan di atas, perlu juga disampaikan kegiatan yang terkait dengan SPIP di BSN yang tidak dirancang untuk dilakukan di tahun 2015. Kegiatan dimaksud adalah kegiatan identifikasi penerapan SPIP di lingkungan BSN yang dimintakan oleh BPK-RI melalui pengisian kuesioner. Pelaksanaan pengisian kuesioner tersebut difasilitasi oleh Inspektorat, yang disampaikan keseluruh Eselon II.

#### **Kesimpulan**

Realisasi indikator kinerja utama dalam mencapai sasaran strategis 2, yang diupayakan melalui komponen kegiatan Pengelolaan Pengendalian Internal pada tahun 2015 diperlukan 11 laporan analisis resiko unit kerja di lingkungan BSN, dengan demikian indikator ini capainnya adalah 100%.

- Target tahun 2015 : - Tindak Lanjut Penyelesaian RTP  
 - 11 Laporan Analisis Resiko Unit Kerja
- Realisasi tahun 2015 : - Tindak Lanjut Penyelesaian RTP  
 - 11 Laporan Analisis Resiko Unit Kerja

## 2) Nilai LAKIP – BSN meningkat

Upaya untuk mencapai sasaran strategis-2 dengan indikator kinerja utama yang menargetkan adanya peningkatan atas kinerja dari BSN, realisasinya dilakukan melalui komponen kegiatan :

### **Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)-BSN**

Sesuai Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014, dilakukan evaluasi terhadap LAKIP – BSN untuk tahun 2014, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Standardisasi Nasional Tahun Anggaran 2014, dengan tujuan:
  - Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP dilingkungan Badan Standardisasi Nasional,
  - Menilai akuntabilitas kinerja Badan Standardisasi Nasional, dan
  - Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas Badan Standardisasi Nasional,
- b. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi : Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja.

Dalam evaluasi tersebut, Inspektorat menyampaikan 7 (tujuh) rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Tim Penyusun LAKIP. Ketujuh rekomendasi tersebut sebagai berikut :

- (1) Renstra Eselon I perlu segera dibuat,
- (2) Rencana Kerja Tahunan (RKT) Eselon I perlu diperbaiki,
- (3) Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon I perlu segera ditetapkan,
- (4) Penetapan Kinerja (PK) Eselon I perlu segera ditetapkan,
- (5) LAKIP Unit Kerja Eselon I Tahun 2015 perlu segera dibuat,

- (6) Perlu ditetapkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang handal dan dilakukan secara berkala,
- (7) Perlu adanya pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya, evaluasi program, dan evaluasi akuntabilitas kinerja atas unit kerja yang selanjutnya disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan, perbaikan penerapan manajemen kinerja, perbaikan kinerja, dan untuk mengukur keberhasilan unit kerja.

Dengan melakukan perbaikan sebagaimana yang direkomendasikan, hasil evaluasi atas pemenuhan rekomendasi menunjukkan nilai  $\geq 65$  pada kategori B.

Terhadap LAKIP-BSN dan hasil evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja tersebut, disampaikan ke Kementerian PAN dan RB dan dilakukan evaluasi dengan hasil penilaian LAKIP-BSN tahun 2014 mendapat nilai 64,20 dengan predikat B (Baik).

### **Kesimpulan**

Berdasarkan data uraian di atas dapat disimpulkan, prosentase capaian atas hasil evaluasi terhadap LAKIP-BSN 2014 adalah 98,77 %, capaian tersebut belum memenuhi apa yang telah ditargetkan, namun ada peningkatan dari tahun sebelumnya (nilai LAKIP-BSN tahun 2013 adalah 63,81 dengan predikat C)

Target tahun 2014 : Nilai LAKIP-BSN naik ke nilai  $\geq 65$  ( B )

Realisasi tahun 2014 : Nilai LAKIP-BSN adalah 64,20 (B).

### **3) Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengawasan Lainnya**

Indikator ini, realisasinya dilaksanakan melalui kegiatan komponen Pengawasan Lainnya, pengawasan dimaksud adalah pengawasan selain Audit, Reviu, Evaluasi dan Pemantauan. Pengawasan lainnya ini, antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

## 1. Kepesertaan dalam kegiatan Seminar/Lokakarya dan pertemuan pengawasan

Dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan wawasan para personel Inspektorat, selain melalui Diklat, Inspektorat selalu mengirimkan personelnnya pada berbagai kegiatan. Kegiatan itu baik yang diselenggarakan di lingkungan BSN maupun di luar BSN, seperti kegiatan yang diselenggarakan oleh BPKP, BPK-RI, KPK, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN dan RB serta Ombudsman RI Kegiatan itu antara lain berupa Forum Kemitraan dan Forum Lokakarya APIP.



Foto 1. Kegiatan Workshop Auditor

## 2. Sosialisasi 4 Perka di Auditorium

Dalam rangka melaksanakan salah satu agenda prioritas BSN yaitu pelaksanaan reformasi birokrasi, Badan Standardisasi Nasional (BSN) menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Kepala BSN (Perka BSN) dan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SE Menteri PAN RB) pada Jumat, 12 Juni 2015 di Ruang Auditorium Gedung BPPT II, Jakarta. Perka BSN yang dimaksud adalah

- Perka BSN No. 4/2014 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BSN
- Perka BSN No.5 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran
- Perka BSN No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan BSN
- Perka BSN No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat



- SE Menteri PAN RB No. 1 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

Kegiatan ini mengundang oleh seluruh pegawai BSN, yang menghadirkan narasumber para Deputi dilingkungan BSN ataupun diwakili oleh eselon2. Narasumber yang mengisi acara Sosialisasi 4 Perka adalah Sekretaris Utama BSN Puji Winarni, Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi BSN Kukuh S.A., Kepala Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi BSN Konny Sagala, Kepala Pusat Pendidikan dan Pemasarakatan Standardisasi BSN Metrawinda Tunus, serta Auditor Madya Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bagus Sunjoyo.



Foto 2. Kegiatan Sosialisasi 4 Peraturan Kepala BSN

### 3. Koordinasi dalam Forum Pengawasan Eksternal

Kegiatan dalam forum pengawasan selalu dilakukan di lingkungan Kementerian Ristek yang terhimpun dalam Forum Inspektorat LPNK Ristek (FILI). Pertemuan dalam Forum ini membahas hal-hal yang aktual sedang berlangsung dan diperbincangkan, terutama berkaitan dengan masalah pengawasan. Beberapa pertemuan diselenggarakan, secara bergiliran.

Pada tahun 2015 BSN menjadi tuan rumah pada bulan Nopember dan kegiatan berupa FGD dilaksanakan tanggal 10 November 2015 di JCC bertepatan dengan acara Bulan Mutu BSN. Foto kegiatan seperti terlihat pada gambar berikut :



Foto 3. Narasumber FGD FILI berasal dari KemenPAN, Sekretariat Negara dan Kementerian Staff Presiden

Peserta FGD adalah seluruh Kepala Inspektorat dan 2 auditor dari masing-masing Inspektorat anggota FILI serta 2 (dua) orang perwakilan setiap unit kerja di BSN.



Foto 4. Peserta FGD FILI

#### **4. Pelaksanaan Seminar Anti Korupsi**

Tanggal 9 Desember merupakan hari anti korupsi dunia. Momentum ini merupakan waktu yang tepat bagi BSN untuk menyelenggarakan Peringatan Hari Anti Korupsi dengan melibatkan seluruh pegawai dan mengundang Dharmawanita. Dengan peringatan ini diharapkan pegawai dan keluarga lebih cepat memahami dan menyadari serta mempunyai cara pandang yang sama mengenai arti pentingnya pencegahan korupsi di kaitkan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Maksud diundangnya Dharmawanita adalah agar dalam keluarga mempunyai persepsi yang sama dalam pemahaman arti pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Kegiatan ini dilaksanakan di ruang Auditorium Gedung II BPPT pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 Jam 08.00-13.00. Seminar ini mengundang oleh seluruh Pegawai BSN dan Dharmawanita yang terdiri dari Istri Pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV dengan total jumlah peserta kurang lebih 450 Orang

##### **Materi Seminar**

1. Sekretaris Menteri Ristek Periode 2010 – 2013 Mulyanto terkait revolusi mental, Mulyanto menyampaikan yang dimaksud dengan revolusi mental menurut Presiden RI I Soekarno yakni suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, dan berjiwa api yang menyala-nyala. Namun, untuk memperbaharui mentalitas suatu bangsa tidak akan selesai dalam satu hari. Memperbaharui mentalitas suatu bangsa tidak seperti orang ganti baju; dilakukan sekali dan langsung tuntas. Dengan 3 nilai dalam revolusi mental yaitu integritas, etos kerja dan gotong royong, Mulyanto berharap tindakan korupsi dapat dicegah.



Foto 5. Penyampaian Materi oleh Mulyanto Mantan Sekretaris Menteri Ristek Periode 2010-2013

2. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf. PPATK sebagai badan intelijen keuangan yakni menerima informasi, menganalisis dan mendesiminasikan. Disamping itu, PPATK dapat menelusur aliran transaksi seseorang atau korporasi. "Tindakan korupsi mayoritas terlacak dalam bentuk tunai/cash," ungkap Yusuf. "



Foto 6. Penyampaian Materi oleh Muhammad Yusuf Narasumber dari PPATK

3. “Pengawasan terhadap kinerja Aparatur melalui LAPOR” disampaikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan, Penyusunan dan Evaluasi Program Pelayanan Publik, Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB) R. Dwiyoga Prabowo Soediartha. Menurut R. Dwiyoga Prabowo Soediartha, LAPOR adalah sarana pengaduan online yang dibangun tim UKP4 (sekarang berubah menjadi KSP) yang pada awalnya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja aparatur, namun dalam perjalanannya juga menangani berbagai macam pengaduan masyarakat. Penyampaian pengaduan memanfaatkan berbagai sarana media elektronik seperti SMS Getaway, email, Twitter, Facebook dan media sosial elektronik lainnya, termasuk juga pengaduan yang masih bersifat manual dalam bentuk surat. Monitoring perjalanan dari masuknya pengaduan sampai kepada penyelesaian pengaduan bersifat terbuka dan mudah.



Foto 7. Penyampaian Materi Oleh R. Dwiyoga P.S Asdep KemenPANRB

Dimeriahkan dengan penampilan Standnia Kulintang & Angklung, Standnia Band serta Fragmen Korupsi “Eh Lift” dihadiri Pengurus Dharma Wanita Persatuan BSN, keluarga besar dan pegawai BSN.



Foto 8. Penampilan Stania Band, Dharmawanita dan Fragment Korupsi Seminar Anti Korupsi

## Kegiatan 019 Kegiatan Pemantauan

### Rapat Kerja Inspektorat

Dalam rangka meningkatkan fungsinya sebagai Aparat Pengendalian Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat melaksanakan kegiatan rapat kerja yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal 30-31 Oktober 2015. Kegiatan rapat kerja ini dilaksanakan untuk mengevaluasi pekerjaan yang sudah terlaksana dan merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan ditahun depan.



Foto Kegiatan Rapat Kerja Inspektorat

## Kesimpulan

Berdasarkan data uraian di atas yang disampaikan dalam satu laporan kegiatan dapat disimpulkan, bahwa pengelolaan pengawasan lainnya capaiannya adalah 100% berdasarkan :

Target tahun 2015 : 1 (satu) dokumen laporan pengawasan lainnya  
- Seminar Anti Korupsi

- FGD FILI
- LHKPN
- Perka Gratifikasi
- Perka Dumas
- Perka Benturan Kepentingan
- Perka WBS
- PPK Inpres
- WBK 5 unit kerja
- LHKASN

Realisasi tahun 2015 : 1 (satu) dokumen laporan pengawasan lainnya

- Seminar Anti Korupsi
- FGD FILI
- LHKPN
- Perka Gratifikasi
- Perka Dumas
- Perka Benturan Kepentingan
- Perka WBS
- PPK Inpres
- WBK 5 unit kerja
- LHKASN

Sebagaimana diuraikan di atas terhadap analisa capaian sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) dan non IKU dapat ditarik kesimpulan bahwa capaian kinerja :

- Rara-rata atas sasaran-1 dan sasaran -2 adalah 98,00 %
- Rata-rata atas kegiatan melalui 10 (sembilan) komponen kegiatan adalah sebesar 96,53 %

### **3.2 Perbandingan Capaian Sasaran dan Kegiatan 2015 dan 2014**

Berdasarkan uraian capaian di muka, jika realisasi capaian rata-rata sasaran dan kegiatan tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut :



**Tabel - 10 Realisasi Capaian Sasaran dan Kegiatan Tahun 2014 dan Tahun 2015**

Uraian	Rata-rata Capaian	
	Sasaran	Kegiatan
Sasaran tahun 2014	100 %	99,74 %
Sasaran tahun 2015	98,00 %	98,20 %

Gambaran capaian pada Tabel – 7 ini, menunjukkan perbandingan capaian sasaran dan kegiatan pada tahun 2015 dan tahun 2014, terlihat adanya penurunan capaian di tahun 2015. Penurunan tersebut, utamanya disebabkan adanya perbaikan indikator kinerja, khususnya pada Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2015 yang lebih memenuhi pada kondisi SMART dan lebih jelas ukuran kinerjanya, serta mengarah pada *outcome*/hasil, khususnya, terlihat pada :

1. Indikator Kinerja untuk evaluasi LAKIP BSN, yang awalnya dinyatakan dengan “Paket dokumen laporan” dengan satuan “laporan” menjadi “Nilai LAKIP BSN meningkat” dengan satuan “prosentase”.
2. Indikator Kinerja TLHA tahun 2014 target 2014 100% pada tahun 2015 target 100%

### **3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN**

#### **3.3.1 Realisasi Keuangan**

Perlu diketahui bahwa alokasi anggaran Inspektorat – BSN hanya terdapat untuk 1 (satu) kegiatan dan merupakan bagian pada program yang dikelola oleh Sestama-BSN. Anggaran kegiatan tersebut tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BSN Tahun 2015. Alokasi anggaran yang tersedia tersebut dalam POK, terbagi dalam 10 (sepuluh) peruntukan belanja kegiatan. Kesepuluh jenis belanja itu adalah belanja Audit Operasional; Pengendalian Intern; Reviu Laporan Keuangan; Evaluasi LAKIP; Monitoring Pedoman Pengawasan Internal; Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT); Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP); Pengawasan Lainnya;

Kegiatan Pemantauan dan Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat. Selain hal tersebut, juga dilakukan pengeluaran dana terhadap beberapa kegiatan pendukung dan khusus, seperti untuk kegiatan pengiriman Diklat personel Inspektorat dan perjalanan, pendanaannya dialokasikan pada kegiatan rutin.

Realisasi anggaran hingga akhir tahun 2015 digambarkan dalam tabel berikut :

**Tabel – 11 Realisasi Anggaran Inspektorat Tahun 2015**

No	Belanja Komponen Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)		Prosentasi Realisasi
		Pagu	Realisasi	
011	Audit Operasional	Rp. 164.287.000,-	Rp.161.917.500,-	98,56 %
012	Pengendalian Intern	Rp. 45.429.000,-	Rp. 43.897.500,-	96,63 %
013	Reviu Laporan Keuangan	Rp. 26.760.000,-	Rp. 23.495.000,-	87,80 %
014	Reviu/Evaluasi LAKIP	Rp. 48.807.000,-	Rp. 46.196.000,-	94,65 %
015	Monitoring Pedoman Pengawasan	Rp. 19.854.000,-	Rp. 19.725.500,-	99,35 %
016	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Rp. 17.040.000,-	Rp. 16.925.000,-	99,33 %
017	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK-RI	Rp. 38.141.000,-	Rp. 37.919.000,-	99,42 %
018	Pengawasan Lainnya (PL)	Rp. 543.134.000,-	Rp.537.893.915,-	99,04 %
019	Kegiatan Pemantauan	Rp. 135.131.000,-	Rp.134.319.000,-	99,40 %
020	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Rp. 33.291.000,-	Rp. 30.346.000,-	91,15 %
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.071.874.000,-</b>	<b>Rp.1.052.634.415,-</b>	<b>98,21 %</b>

Sebagaimana tersaji pada tabel anggaran Inspektorat Tahun 2015 di atas, sampai akhir tahun 2015, Inspektorat merealisasikan anggarannya sebesar **Rp. 1.052.634.415,-**

atau sebesar **98,21 %** dari total anggaran pagu sebesar **Rp. 1.071.874.000,-**. Prosentase realisasi ini telah memenuhi apa yang diharapkan atas pengelolaan realisasi anggaran di Unit Kerja Inspektorat BSN. Sisa saldo dari realisasi anggaran sebesar **Rp. 19.239.585,-** atau **1,79 %**, adalah merupakan penghematan yang dapat dilakukan Inspektorat dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran.

### 3.3.2 Perbandingan Realisasi Keuangan

Jika realisasi akuntabilitas keuangan tahun 2015 dibandingkan dengan realisasi akuntabilitas keuangan tahun 2014, tergambar sebagai berikut :

**Tabel – 12 Realisasi Anggaran Tahun 2014 dan Tahun 2015**

<b>Belanja Komponen Kegiatan</b>	<b>Pagu</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Prosentasi Realisasi</b>
<b>Tahun 2014</b>	<b>Rp. 867.866.000,00</b>	<b>Rp.766.560.200,00</b>	<b>88,33 %</b>
<b>Tahun 2015</b>	<b>Rp.1.071.874.000,00</b>	<b>Rp.1.052.634.415,00</b>	<b>98,21 %</b>

Dari gambaran pada tabel-12 di atas, terlihat adanya Kenaikan pagu anggaran pada tahun 2015.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

- a. Capaian rata-rata atas sasaran yang telah ditetapkan, sebesar 100 % untuk sasaran I dan 100 % untuk sasaran II, dan rata-rata realisasi sasarnya adalah 96,13 % dengan melalui 10 (sepuluh) komponen kegiatan, capaiannya adalah 96,53 % atau kondisi capaiannya dengan predikat amat baik. Sedang capaian realisasi anggaran dalam membiayai kegiatan tersebut adalah sebesar 98,21%.
- b. Melalui kerjasama yang sudah baik antar berbagai unit di BSN dalam pelaksanaan kegiatan dengan berpandu pada peraturan perundangan yang berlaku, diharapkan untuk tahun 2015 ini BSN tetap mendapat opini WTP (untuk yang ketujuh kalinya berturut-turut sejak tahun 2008) dari hasil pemeriksaan BPK-RI.
- c. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, menjadikan hasil pengawasan masih belum maksimal.
- d. Proses pengawasan yang telah diimplementasikan selama tahun 2015 menunjukkan peningkatan dan dapat dipertahankan serta masih perlu ditingkatkan seiring dengan reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan di BSN.

#### **4.2 SARAN**

- 1) Untuk lebih mengoptimalkan kegiatan Inspektorat, masih diperlukan penambahan jumlah dan peningkatan kemampuan SDM, manajemen waktu, sarana dan prasarana serta didukung dengan dana yang memadai.
- 2) Diharapkan komunikasi dan kerjasama yang sudah berjalan dengan baik antar Inspektorat dan Unit-unit kerja di BSN dalam pelaksanaan audit dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan (khususnya terkait dengan penyiapan data/bahan audit).

- 3) Perencanaan kinerja dan penganggaran masih perlu ditingkatkan pengelolaannya sehingga penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (DIPA, POK) tidak berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
- 4) Agar pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran di masing-masing Unit Kerja dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan, maka peran para manajemen unit kerja di lingkungan BSN perlu optimalisasi kerjasama dan pengendalian internal untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan.
- 5) Diharapkan tindaklanjut/respon terhadap temuan/rekomendasi dari Inspektorat yang sudah berjalan cukup baik dapat dipertahankan dan ditingkatkan oleh *auditee*, sehingga dapat lebih mengoptimalkan perbaikan pertanggungjawaban laporan keuangan.
- 6) Dengan telah disusunnya dokumen SPI di masing-masing unit kerja diharapkan dapat meningkatkan kinerja unit kerja dan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan audit.

\_\_\_\_\_oOo\_\_\_\_\_